

Nama : Lusi Yana Agustina
NPM : 2313031069
Kelas : C
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan (UAS)
Dosen Pengampu : 1. Dr. Pujiati, M.Pd
2. Dr. Meyta pritandari, M.Pd
3. Fanni rahmawati, M.Pd.

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Jawaban:

Pada kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten A telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar, yaitu 30% dari APBD. Namun, sebagian besar dana hanya difokuskan pada pembangunan gedung sekolah baru.

- Dari sisi efisiensi internal, kebijakan ini memang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah karena fasilitas pendidikan bertambah dan akses masyarakat terhadap sekolah menjadi lebih mudah. Akan tetapi, peningkatan kualitas pendidikan belum tercapai karena pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Akibatnya, proses pembelajaran kurang berkembang dan hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum efisien secara internal karena input pendidikan belum dimanfaatkan secara seimbang untuk menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik.
- Sementara itu, dari sisi efisiensi eksternal, pendidikan seharusnya mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja. Pada kasus ini, peningkatan jumlah siswa yang bersekolah tidak

diikuti dengan peningkatan kompetensi siswa. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan masih rendah dan belum mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja secara optimal. Dengan demikian, penggunaan anggaran pendidikan tersebut juga belum efisien secara eksternal karena manfaat pendidikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masih kurang maksimal.

2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Jawaban:

Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan fisik sekolah memberikan dampak kurang baik terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun akses pendidikan meningkat, kualitas pembelajaran tetap rendah karena guru kurang mendapatkan pelatihan dan fasilitas pembelajaran modern belum memadai. Akibatnya, siswa kurang memiliki keterampilan berpikir kritis, kemampuan teknologi, dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat dan daya saing sumber daya manusia.

Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Agar penggunaan anggaran pendidikan lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu menerapkan beberapa kebijakan yang lebih berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Moratorium dan Re-alokasi Anggaran

Menghentikan sementara pembangunan gedung sekolah baru dan mengalihkan sebagian anggaran untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan sarana pembelajaran digital.

2. Pelatihan Guru Berkelanjutan

Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi guru yang berfokus pada peningkatan kompetensi mengajar, penggunaan metode pembelajaran aktif (*active learning*), serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

3. Digitalisasi Sekolah Terintegrasi

Menyediakan media pembelajaran digital yang didukung dengan pelatihan bagi guru dan siswa agar penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat berjalan efektif dan meningkatkan kualitas belajar.

4. Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*)

Mengubah indikator keberhasilan anggaran pendidikan dari yang sebelumnya berfokus pada pembangunan fisik menjadi peningkatan kualitas pendidikan, seperti kenaikan kemampuan literasi, numerasi, dan kompetensi siswa.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

Jawaban:

Pada kasus tersebut, ketimpangan pendidikan terjadi antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap seperti laboratorium, akses internet cepat, dan tenaga pendidik profesional. Sebaliknya, sekolah di pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas belajar yang minim, serta keterbatasan teknologi. Perbedaan ini menyebabkan kesempatan siswa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi tidak merata.

Ketimpangan pendidikan tersebut dapat dilihat dalam dua bentuk. Pertama, ketimpangan input pendidikan (*inequality of input/opportunity*), yaitu perbedaan ketersediaan sarana, prasarana, teknologi, dan kualitas tenaga pengajar antara sekolah di kota dan desa. Siswa di perkotaan memperoleh dukungan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan siswa di pedesaan. Kedua, ketimpangan output pendidikan (*inequality of output/outcome*), yaitu perbedaan hasil pendidikan yang ditunjukkan melalui rendahnya hasil ujian siswa di desa dibandingkan siswa di kota. Ketimpangan hasil ini muncul akibat perbedaan kualitas fasilitas dan proses pembelajaran yang diterima siswa

2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Jawaban:

Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang yang cukup besar. Perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan desa menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi tidak merata. Lulusan dari wilayah perkotaan yang memiliki kompetensi lebih baik akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di sektor modern dengan pendapatan tinggi, sedangkan lulusan dari pedesaan cenderung bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan (*wage gap*) antara masyarakat kota dan desa.

Selain itu, ketimpangan pendidikan juga dapat menciptakan lingkaran kemiskinan (*vicious cycle of poverty*). Rendahnya kualitas pendidikan di pedesaan membuat masyarakat sulit meningkatkan taraf hidup karena keterampilan dan peluang kerja yang terbatas. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi antarwilayah menjadi tidak merata. Daerah perkotaan berkembang lebih cepat, sementara daerah pedesaan semakin

tertinggal dan mengalami *brain drain*, yaitu perpindahan sumber daya manusia potensial dari desa ke kota.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan tersebut, pemerintah perlu menerapkan beberapa kebijakan berikut:

1. Redistribusi dan Insentif Guru Profesional

Pemerintah perlu melakukan pemerataan distribusi guru dengan menempatkan guru profesional ke daerah pedesaan. Selain itu, perlu diberikan insentif berupa tunjangan khusus, fasilitas, dan jaminan pengembangan karier bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil.

2. Program Digitalisasi Desa (*Education Technology Equalization*)

Pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur internet di sekolah pedesaan dan menyediakan bantuan perangkat pembelajaran digital seperti komputer atau tablet agar siswa desa dapat memperoleh akses belajar yang lebih baik.

3. Penerapan Formula Anggaran Asimetris (*Affirmative Funding*)

Sekolah di daerah pedesaan yang masih tertinggal perlu mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan sekolah di perkotaan agar pemerataan fasilitas pendidikan dapat tercapai.

4. Standardisasi Fasilitas Minimal Berbasis Zonasi Mutu

Pemerintah perlu menetapkan standar minimal fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi yang wajib dimiliki seluruh sekolah sehingga kualitas pendidikan antarwilayah dapat lebih merata.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.

Jawaban:

Berdasarkan teori *human capital*, pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan

produktivitas kerja. Dalam kasus tersebut, meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi seharusnya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, banyak lulusan justru menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Pengangguran terdidik pada kasus ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi lebih banyak memberikan teori dibandingkan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Selain itu, perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang berubah cepat tidak diimbangi dengan pembaruan kurikulum dan peningkatan kompetensi lulusan. Akibatnya, investasi pendidikan yang dilakukan belum mampu menghasilkan *human capital* yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan dunia kerja.

2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Jawaban:

Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan berfungsi menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Pada kasus tersebut, hubungan antara pendidikan dan pasar kerja belum berjalan secara seimbang. Perguruan tinggi menghasilkan banyak lulusan, tetapi kualitas dan keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, lulusan sulit terserap di dunia kerja meskipun jumlahnya terus meningkat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Pasar kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, keterampilan digital, komunikasi, serta pengalaman kerja, sedangkan sebagian lulusan belum memiliki kompetensi tersebut. Oleh karena itu, pendidikan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi ekonominya sebagai penyedia tenaga kerja yang produktif dan siap kerja.

Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, perlu dilakukan beberapa upaya berikut:

1. Penyesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Industri

Perguruan tinggi perlu memperbarui kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

2. Peningkatan Program Magang dan Praktik Kerja

Mahasiswa perlu diberikan lebih banyak kesempatan magang agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan praktis sebelum lulus.

3. **Kerja Sama antara Perguruan Tinggi dan Industri**

Perguruan tinggi perlu menjalin kerja sama dengan perusahaan dalam penyusunan kurikulum, pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja.

4. **Pengembangan Soft Skill dan Keterampilan Digital**

Selain kemampuan akademik, mahasiswa juga perlu dibekali keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, dan kemampuan teknologi digital.

5. **Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan**

Perguruan tinggi perlu mendorong lulusan untuk memiliki jiwa wirausaha agar tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Jawaban:

Pendidikan dapat dipandang sebagai barang publik sekaligus barang privat. Sebagai barang publik, pendidikan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi. Dalam kasus tersebut, kenaikan uang kuliah sebesar 25% berpotensi mengurangi akses mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pendidikan sebagai barang publik dapat terganggu karena tidak semua masyarakat mampu menjangkaunya.

Di sisi lain, pendidikan juga merupakan barang privat karena individu yang memperoleh pendidikan tinggi akan mendapatkan manfaat pribadi, seperti peluang kerja yang lebih baik, pendapatan lebih tinggi, dan peningkatan status sosial. Berdasarkan sudut pandang ini, universitas menaikkan biaya kuliah untuk meningkatkan fasilitas dan layanan akademik agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Dengan demikian, mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung juga dianggap perlu menanggung sebagian biaya pendidikan tersebut.

2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Jawaban:

Kenaikan biaya pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, kenaikan uang kuliah dapat memperbesar ketimpangan akses pendidikan antara kelompok ekonomi mampu dan kurang mampu. Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah berisiko mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan, bahkan dapat memilih berhenti kuliah karena keterbatasan biaya.

Dari sisi ekonomi, tingginya biaya pendidikan dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperbesar kesenjangan pendapatan dan menghambat mobilitas sosial masyarakat. Selain itu, jika akses pendidikan tinggi semakin terbatas, jumlah tenaga kerja terdidik juga dapat berkurang sehingga berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap kenaikan biaya pendidikan karena pendidikan memiliki fungsi penting bagi pembangunan masyarakat dan negara. Jika biaya pendidikan terlalu tinggi, maka akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi menjadi tidak merata, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperbesar kesenjangan ekonomi.

Intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, subsidi pendidikan, bantuan biaya kuliah, atau pengawasan terhadap kebijakan kenaikan uang kuliah agar tetap wajar dan terjangkau. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan biaya pendidikan benar-benar diikuti dengan peningkatan kualitas layanan akademik. Dengan adanya intervensi pemerintah, akses pendidikan tinggi dapat tetap terbuka bagi seluruh masyarakat sehingga kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkat secara merata.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.

Jawaban:

Pada kasus tersebut, penerapan pembelajaran berbasis digital setelah pandemi menimbulkan tambahan biaya pendidikan bagi siswa dan keluarga. Biaya pendidikan tidak hanya berupa uang sekolah, tetapi juga mencakup biaya perangkat elektronik, kuota internet, dan akses teknologi yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran daring. Bagi keluarga kurang mampu, biaya tersebut menjadi beban ekonomi yang cukup besar sehingga banyak siswa mengalami kesulitan mengikuti proses belajar secara optimal.

Selain itu, terdapat konsep *opportunity cost* atau biaya peluang dalam kasus ini. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi harus memilih antara menggunakan pendapatan untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau membeli perangkat dan kuota internet untuk pendidikan anak. Akibatnya, pendidikan menjadi kurang diprioritaskan karena keluarga lebih mendahulukan kebutuhan dasar. Kondisi ini menyebabkan partisipasi belajar siswa menurun dan memperbesar ketimpangan akses pendidikan.

2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Jawaban:

Kesenjangan digital dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas pendidikan. Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet memadai dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, memperoleh materi lebih lengkap, serta mengembangkan kemampuan teknologi. Sebaliknya, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami hambatan dalam mengakses pembelajaran sehingga tertinggal dalam memahami materi pelajaran.

Kondisi tersebut menyebabkan kualitas hasil belajar menjadi tidak merata. Dalam jangka panjang, kesenjangan digital dapat memperbesar ketimpangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Siswa yang tertinggal dalam akses teknologi juga berisiko memiliki kemampuan digital yang rendah sehingga sulit bersaing di dunia pendidikan maupun dunia kerja di masa depan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah kesenjangan digital dalam pendidikan, pemerintah dan sekolah perlu menerapkan beberapa kebijakan berikut:

1. Pemberian Bantuan Perangkat dan Kuota Internet

Pemerintah dapat memberikan bantuan laptop, tablet, atau subsidi kuota internet bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran digital.

2. Pembangunan Infrastruktur Internet yang Merata

Pemerintah perlu memperluas jaringan internet terutama di daerah terpencil dan pedesaan agar seluruh siswa memiliki akses pembelajaran yang sama.

3. Penyediaan Fasilitas Belajar Bersama

Sekolah atau pemerintah daerah dapat menyediakan pusat belajar digital seperti laboratorium komputer atau ruang internet gratis untuk membantu siswa yang tidak memiliki perangkat pribadi.

4. Pelatihan Literasi Digital

Guru, siswa, dan orang tua perlu diberikan pelatihan penggunaan teknologi agar pembelajaran digital dapat berjalan lebih efektif.

5. Pengembangan Sistem Pembelajaran Fleksibel

Sekolah dapat menyediakan alternatif pembelajaran seperti modul cetak atau pembelajaran luring terbatas bagi siswa yang mengalami kendala akses teknologi.